

PENGARUH KEPEMIMPINAN CAMAT TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT

Riwanda Wira Nugraha¹⁾, Dahly Sukmapryandhika²⁾, Waluyo Zulfikar³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jendral Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kepemimpinan camat terhadap efektivitas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Latar belakang penelitian ini adalah masih belum optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di tingkat kecamatan, yang ditandai dengan rendahnya pemanfaatan fasilitas, terbatasnya promosi, serta minimnya pelatihan keterampilan bagi pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan jumlah populasi sebanyak 5.753 pelaku UMKM, dan sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan, seperti angket dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan camat tergolong cukup baik dengan nilai rata-rata 1,95, dan efektivitas pemberdayaan UMKM juga berada pada kategori cukup baik dengan nilai rata-rata 1,98. Analisis statistik menghasilkan koefisien determinasi sebesar 94,09%, yang berarti terdapat pengaruh yang sangat kuat antara kepemimpinan camat dan efektivitas pemberdayaan UMKM. Temuan ini memperkuat pentingnya peran kepemimpinan lokal dalam menggerakkan sektor UMKM sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Camat, Pemberdayaan, UMKM, Efektivitas

Abstract

This study aims to determine the extent to which sub-district head leadership influences the effectiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) empowerment in Padalarang Sub-district, West Bandung Regency. The background of this research is the suboptimal implementation of MSME empowerment programs at the sub-district level, as indicated by the limited use of available facilities, lack of promotional efforts, and minimal skills training provided to business actors. This research employs a descriptive quantitative approach, with a total population of 5,753 MSME actors and a sample of 100 respondents. Data were collected through literature review and field studies, including questionnaires and direct observation. The results show that the sub-district head's leadership is categorized as fairly good, with an

average score of 1.95, while the effectiveness of MSME empowerment is also rated fairly good, with an average score of 1.98. Statistical analysis shows a determination coefficient of 94.09%, indicating a very strong influence of leadership on empowerment effectiveness. These findings reinforce the importance of local leadership in driving the MSME sector as a key component of regional economic development.

Keywords: Leadership, Sub-district Head, Empowerment, MSMEs, Effectiveness

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki visi besar untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi lokal. Salah satu cara yang strategis dalam pencapaian tujuan ini adalah pemberdayaan sektor UMKM yang terbukti mampu bertahan di tengah krisis ekonomi. Namun, efektivitas pemberdayaan ini seringkali ditentukan oleh faktor kepemimpinan di tingkat lokal, khususnya camat sebagai kepala wilayah.

Sejarah membuktikan bahwa UMKM memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Misalnya, ketika Indonesia menghadapi krisis ekonomi tahun 1998, sektor UMKM terbukti tetap bertahan dan bahkan mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional, sementara banyak perusahaan besar mengalami penurunan tajam atau bahkan gulung tikar. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM bukan hanya strategi ekonomi semata, tetapi juga langkah strategis dalam menjaga kemandirian dan kedaulatan ekonomi rakyat.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, menyadari pentingnya peran UMKM dalam menggerakkan roda perekonomian. Oleh karena itu, berbagai program pemberdayaan terus digalakkan, mulai dari pelatihan, bantuan modal, hingga kemudahan perizinan usaha. Namun, dalam implementasinya di lapangan, efektivitas pemberdayaan UMKM tidak hanya bergantung pada program-program tersebut, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh peran aktor lokal, seperti camat, yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan tingkat kecamatan.

Salah satu faktor krusial yang memengaruhi efektivitas program pemberdayaan UMKM di daerah adalah kepemimpinan di tingkat lokal, khususnya camat sebagai pimpinan tertinggi di kecamatan. Camat memiliki peran yang sangat strategis karena berada di posisi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan pelaku usaha. Dalam konteks

desentralisasi, camat tidak hanya berfungsi sebagai administrator, tetapi juga diharapkan menjadi pemimpin yang mampu mendorong partisipasi masyarakat dan menciptakan kolaborasi lintas sektor di wilayahnya.

Salah satu sektor yang dianggap sangat potensial untuk mendukung tujuan tersebut adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional, bahkan ketika krisis ekonomi melanda pada tahun 1998, UMKM justru menjadi sektor yang mampu bertahan dan tetap eksis, dibandingkan dengan sektor usaha besar yang justru banyak mengalami kerugian dan penurunan produksi.

Pemerintah menyadari pentingnya sektor UMKM ini, sehingga berbagai kebijakan dan program pemberdayaan telah banyak diluncurkan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Tujuannya tentu untuk memperkuat daya saing UMKM, meningkatkan kapasitas pelaku usahanya, serta menciptakan iklim usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Namun demikian, keberhasilan pemberdayaan UMKM ini sangat tergantung pada peran aktor lokal, terutama camat sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat kecamatan. Camat memiliki posisi strategis dalam menjembatani kepentingan masyarakat, termasuk pelaku UMKM, dengan kebijakan dan program pemerintah.

Camat, sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat kecamatan, memiliki fungsi koordinatif sekaligus fasilitatif dalam menjembatani program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Seharusnya, camat mampu menjadi motor penggerak dalam pemberdayaan UMKM, baik dengan menyusun strategi lokal yang tepat, maupun dengan mendorong partisipasi aktif pelaku UMKM. Namun pada kenyataannya, peran camat belum selalu berjalan maksimal.

Kecamatan Padalarang sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung Barat memiliki jumlah UMKM yang cukup besar dan beragam. Jenis usaha yang ada pun bervariasi, mulai dari usaha kuliner, konveksi, kerajinan, hingga jasa. Dengan jumlah UMKM yang mencapai lebih dari 5.700 unit, sebenarnya daerah ini memiliki potensi ekonomi lokal yang luar

biasa. Namun, dalam kenyataannya, pemberdayaan UMKM di wilayah ini masih menghadapi sejumlah tantangan dan belum berjalan secara optimal.

Beberapa permasalahan yang muncul antara lain terbatasnya akses pasar bagi produk UMKM yang masih sebatas dijual di lingkungan sekitar saja, kurangnya inovasi dalam pengemasan dan promosi produk, serta rendahnya literasi digital pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi sebagai sarana pemasaran. Di sisi lain, pelaku UMKM juga mengalami kesulitan dalam menjalin kemitraan dengan pihak swasta karena terkendala biaya sewa tempat yang tinggi dan minimnya fasilitas promosi yang disediakan oleh pemerintah.

Dugaan sementara dari kondisi tersebut adalah belum optimalnya peran dan kepemimpinan camat dalam mendorong dan mengarahkan proses pemberdayaan UMKM di wilayahnya. Misalnya, pelatihan atau pendampingan teknis dari pihak kecamatan masih sangat jarang dilakukan, kurang adanya sosialisasi pentingnya legalitas usaha, serta minimnya dialog dua arah antara pemerintah kecamatan dengan para pelaku UMKM. Padahal, kepemimpinan camat yang baik seharusnya mampu menginisiasi kegiatan-kegiatan yang bersifat mendorong partisipasi pelaku usaha, mengakomodasi aspirasi mereka, serta memfasilitasi akses terhadap sumber daya dan jaringan usaha.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan camat sebagai penggerak pemberdayaan ekonomi lokal belum sepenuhnya optimal. Padahal, camat yang memiliki kepemimpinan partisipatif dan komunikatif dapat menjadi agen perubahan yang mampu membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kepemimpinan yang kuat tidak hanya mampu mendorong partisipasi, tetapi juga menginspirasi, mengarahkan, dan memperjuangkan kepentingan pelaku UMKM di tingkat lokal.

Melihat kondisi tersebut, penulis merasa penting untuk meneliti lebih dalam sejauh mana kepemimpinan camat berpengaruh terhadap efektivitas pemberdayaan UMKM di Kecamatan Padalarang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran camat dalam mendorong keberhasilan program pemberdayaan, sekaligus memberikan

masukannya bagi pihak terkait agar pelaksanaan program ke depan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara dua variabel, yaitu kepemimpinan camat (sebagai variabel bebas) terhadap efektivitas pemberdayaan UMKM (sebagai variabel terikat). Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengolah data secara statistik agar hasil yang diperoleh lebih objektif dan terukur.

Jenis penelitian deskriptif digunakan karena peneliti tidak hanya ingin mengungkap hubungan antar variabel, tetapi juga ingin memberikan gambaran mendalam mengenai kondisi aktual kepemimpinan camat serta pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di Kecamatan Padalarang. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan informasi empiris yang tidak hanya bermanfaat secara akademik, tetapi juga relevan secara praktis.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat tahun 2024, jumlah pelaku UMKM di Kecamatan Padalarang mencapai 5.753 orang. Melihat besarnya jumlah populasi tersebut, peneliti menggunakan teknik *purposive random sampling* untuk menentukan sampel, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak namun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti keterlibatan aktif dalam kegiatan UMKM, domisili di wilayah Kecamatan Padalarang, dan kesiediaan menjadi responden. Dari hasil pemilihan, diperoleh sebanyak 100 responden yang dianggap mewakili populasi secara proporsional.

Sebelum angket digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa seluruh butir pertanyaan benar-benar mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat dan konsisten. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi statistik SPSS.

Berdasarkan hasil uji tersebut, seluruh item dinyatakan valid dan reliabel, sehingga layak digunakan sebagai instrumen pengumpulan data.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan dua teknik utama, yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji literatur yang relevan, baik dari buku, jurnal, undang-undang, maupun dokumen-dokumen resmi lainnya. Sementara itu, studi lapangan dilakukan dengan menggunakan angket (kuesioner) yang dibagikan langsung kepada responden, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di Kecamatan Padalarang. Sebelum digunakan, instrumen angket terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya agar dapat dipastikan bahwa setiap butir pertanyaan benar-benar mampu mengukur variabel yang dimaksud, serta memiliki konsistensi yang tinggi. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan bantuan program SPSS, dan hasilnya menunjukkan bahwa seluruh item yang digunakan valid dan reliabel.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk melihat gambaran umum dari jawaban responden, sedangkan analisis inferensial dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi Pearson untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara kepemimpinan camat dan efektivitas pemberdayaan UMKM. Selain itu, digunakan juga koefisien determinasi (r^2) untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Semua hasil perhitungan dan interpretasi disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan uraian naratif agar lebih mudah dipahami.

PEMBAHASAN

1) Kepemimpinan Camat

Kepemimpinan camat diukur melalui enam indikator teknik kepemimpinan menurut Pamudji (1993), yakni: teknik pematangan pengikut, teknik human relations, teknik menjadi teladan, teknik persuasi dan perintah, sistem komunikasi, dan penyediaan fasilitas. Berdasarkan hasil angket, mayoritas responden menilai bahwa camat telah menerapkan teknik tersebut secara cukup baik, namun belum maksimal.

Dari indikator pematangan pengikut, terlihat bahwa camat sudah berupaya untuk membina aparatur dan jajarannya agar lebih siap dan mampu dalam menjalankan tugas, termasuk dalam mendukung kegiatan pemberdayaan UMKM. Teknik menjadi teladan juga dirasakan cukup baik, di mana camat dinilai mampu memberikan contoh sikap disiplin dan tanggung jawab dalam kepemimpinannya. Beberapa responden mengakui bahwa camat cukup aktif dalam menghadiri kegiatan masyarakat dan memberikan arahan yang membangun.

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu program di tingkat pemerintahan daerah, termasuk dalam hal pemberdayaan UMKM. Dalam penelitian ini, kepemimpinan Camat diukur menggunakan enam indikator teknik kepemimpinan yang dikemukakan oleh Pamudji (1993), yaitu: teknik pematangan pengikut, teknik human relations, teknik menjadi teladan, teknik persuasi dan pemberian perintah, penggunaan sistem komunikasi yang cocok, dan teknik penyediaan fasilitas.

Hasil angket yang disebarkan kepada responden menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka menilai Camat Padalarang sudah cukup baik dalam menerapkan teknik-teknik tersebut. Misalnya, sebagian besar responden merasa bahwa camat cukup aktif memberikan motivasi dan menjadi contoh atau teladan yang baik bagi bawahannya. Selain itu, teknik komunikasi yang diterapkan dinilai sudah membantu menyampaikan informasi dengan jelas dan terbuka.

Namun demikian, pelaksanaan dari teknik-teknik kepemimpinan ini belum bisa dikatakan maksimal. Masih ada kekurangan, terutama dalam hal penyediaan fasilitas bagi pelaku UMKM, seperti minimnya dukungan sarana prasarana promosi, pelatihan rutin, maupun ruang pemasaran. Begitu pula dengan teknik human relations yang seharusnya melibatkan pendekatan personal atau dialog langsung dengan pelaku usaha, namun dirasakan masih jarang dilakukan secara menyeluruh. Dengan demikian, meskipun kepemimpinan camat sudah berada pada kategori "cukup baik", peningkatan kualitas dalam pelaksanaannya tetap diperlukan agar hasilnya bisa lebih optimal.

Oleh karena itu, walaupun camat telah menjalankan peran kepemimpinannya secara cukup baik, namun peningkatan masih sangat diperlukan—terutama dalam hal membangun relasi sosial yang lebih kuat dengan pelaku UMKM dan menyediakan fasilitas yang benar-benar sesuai kebutuhan lapangan. Kepemimpinan yang lebih terbuka, partisipatif, dan solutif akan sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan UMKM di wilayah kecamatan.

2) Efektivitas Pemberdayaan UMKM

Efektivitas pemberdayaan UMKM diukur dari indikator adaptasi, integrasi, motivasi, dan produksi. Hasil angket menunjukkan bahwa pelaku UMKM merasa belum seluruh program pemberdayaan berjalan optimal, terutama dalam aspek promosi, perizinan, dan pelatihan keterampilan.

Hasil angket menunjukkan bahwa secara umum pelaku UMKM menganggap program pemberdayaan di Kecamatan Padalarang berada pada tingkat “cukup efektif”, meskipun masih banyak hal yang perlu dibenahi. Misalnya, dari indikator adaptasi, sebagian besar pelaku usaha menyatakan bahwa mereka belum sepenuhnya bisa mengikuti perkembangan digitalisasi, terutama dalam hal penggunaan media sosial dan e-commerce sebagai sarana promosi dan penjualan. Padahal, kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi kunci penting untuk memperluas jangkauan pasar saat ini.

Pada aspek integrasi, kerja sama antara pelaku UMKM dengan sektor lain seperti hotel, toko modern, atau pelaku industri lainnya juga masih minim. UMKM cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa dukungan kemitraan yang kuat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan dan daya saing produk mereka.

Indikator motivasi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM memang memiliki semangat yang tinggi untuk mengembangkan usahanya. Namun, motivasi tersebut tidak selalu diiringi dengan dukungan konkret dari pemerintah, seperti pelatihan keterampilan, akses informasi bisnis, atau pendampingan usaha. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang semangatnya stagnan karena merasa jalan sendiri tanpa arahan yang jelas.

Efektivitas pemberdayaan UMKM dalam penelitian ini diukur melalui empat indikator utama, yaitu: adaptasi, integrasi, motivasi, dan produksi. Berdasarkan hasil angket, terlihat bahwa sebagian besar pelaku UMKM menganggap program pemberdayaan yang dijalankan oleh pihak Kecamatan Padalarang belum sepenuhnya efektif.

Misalnya, pada aspek adaptasi, pelaku UMKM belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, terutama dalam hal digitalisasi pemasaran. Di sisi lain, integrasi antara UMKM dengan mitra usaha seperti toko modern, hotel, atau jaringan e-commerce juga masih sangat terbatas. Dalam hal motivasi, memang terlihat semangat dari para pelaku UMKM untuk berkembang cukup tinggi, tetapi kurangnya pendampingan dan pelatihan menyebabkan motivasi tersebut tidak berkembang maksimal. Sementara pada aspek produksi, sebagian besar UMKM masih memproduksi barang secara tradisional dan dalam skala kecil, yang tentu berdampak pada daya saing mereka di pasar yang lebih luas.

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pemberdayaan UMKM di Kecamatan Padalarang berada pada tingkat "cukup baik", tetapi memerlukan perbaikan dan dukungan yang lebih sistematis agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai secara maksimal.

3) Hubungan Antara Variabel

Hasil analisis menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,97, yang berarti terdapat hubungan sangat kuat antara kepemimpinan camat dan efektivitas pemberdayaan UMKM. Nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 94,09% menunjukkan bahwa sebagian besar variasi efektivitas pemberdayaan UMKM dapat dijelaskan oleh kepemimpinan camat.

Untuk melihat seberapa besar pengaruh kepemimpinan camat terhadap efektivitas pemberdayaan UMKM, dilakukan analisis statistik dengan menggunakan koefisien korelasi Pearson. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,97, yang berarti terdapat hubungan sangat kuat antara variabel kepemimpinan camat dan efektivitas pemberdayaan UMKM.

Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan camat memainkan peran yang sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan pemberdayaan UMKM di tingkat kecamatan. Artinya, semakin baik pola kepemimpinan yang diterapkan camat—dalam hal memberikan arahan, membangun komunikasi, hingga memfasilitasi kegiatan usaha—maka semakin tinggi pula efektivitas dari program pemberdayaan UMKM yang dirasakan oleh masyarakat.

Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel kepemimpinan camat terhadap efektivitas pemberdayaan UMKM, dilakukan perhitungan koefisien determinasi (r^2). Nilainya sebesar 94,09%, yang artinya hampir seluruh perubahan atau variasi dalam efektivitas pemberdayaan UMKM dapat dijelaskan oleh kualitas kepemimpinan camat. Sedangkan sisanya sebesar 5,91% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel penelitian ini, seperti permodalan, akses pasar, manajemen usaha, dan regulasi eksternal lainnya.

Hasil ini membuktikan bahwa kepemimpinan camat memiliki pengaruh yang sangat besar dan signifikan terhadap keberhasilan pemberdayaan UMKM. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan peran aktif camat dalam kegiatan pemberdayaan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan ke depan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan camat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemberdayaan UMKM di Kecamatan Padalarang, dengan kontribusi pengaruh sebesar 94,09%. Sisa 5,91% dipengaruhi oleh faktor lain seperti permodalan, akses pasar, dan regulasi. Maka, peningkatan kapasitas kepemimpinan camat sangat diperlukan untuk memperkuat pemberdayaan pelaku UMKM secara menyeluruh.

Dengan kata lain, semakin baik camat dalam menerapkan teknik-teknik kepemimpinannya—seperti memberikan motivasi, menjadi teladan, menjalin komunikasi yang terbuka, serta memfasilitasi kebutuhan pelaku usaha—maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas program pemberdayaan UMKM yang dijalankan. Sebaliknya, jika kepemimpinan tersebut belum optimal, maka dampaknya akan terasa pada rendahnya capaian program pemberdayaan yang dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan camat memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM) di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,97, yang menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara kedua variabel tersebut, serta nilai koefisien determinasi sebesar 94,09% yang mengindikasikan bahwa hampir seluruh efektivitas pemberdayaan UMKM dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan camat.

Artinya, semakin baik kepemimpinan camat dalam menjalankan teknik-teknik kepemimpinannya—seperti menjadi teladan, membangun komunikasi yang baik, memfasilitasi kebutuhan pelaku usaha, dan memberikan motivasi—maka semakin efektif pula program pemberdayaan UMKM di wilayah tersebut dapat dijalankan. Namun demikian, masih terdapat 5,91% pengaruh dari faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti ketersediaan permodalan, akses terhadap pasar yang lebih luas, keterbatasan teknologi, dan juga regulasi atau kebijakan pemerintah di luar kewenangan kecamatan.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kepemimpinan camat menjadi salah satu kunci utama yang perlu diperhatikan dalam upaya mendorong pemberdayaan UMKM yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah kecamatan, pelaku usaha, serta pihak swasta dan masyarakat luas juga perlu terus dibangun agar UMKM di Kecamatan Padalarang dapat tumbuh secara maksimal dan mampu bersaing, baik di tingkat lokal maupun lebih luas.

Dengan kepemimpinan yang adaptif, responsif, dan berpihak pada pengembangan ekonomi lokal, diharapkan UMKM di Kecamatan Padalarang dapat terus berkembang, lebih berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Selain itu, dibutuhkan pula sinergi dan kolaborasi lintas sektor, baik antara pemerintah kecamatan dengan perangkat desa, pelaku UMKM, sektor swasta, lembaga keuangan, maupun masyarakat secara umum. Dengan kerja sama yang terbangun secara berkesinambungan, UMKM di Kecamatan Padalarang memiliki peluang besar untuk tumbuh lebih mandiri, inovatif, dan kompetitif, baik di tingkat lokal maupun dalam menghadapi pasar yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko, T.H. (1999). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Lubis, N. (1985). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: LP3ES.
- Pamudji, S. (1993). *Administrasi Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, U. (2002). *Administrasi Publik*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Suharto, E. (2005). *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Suhendra, E. (2006). *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Agus, D. (2011). *Manajemen strategik: Dalam organisasi publik dan bisnis*. Yogyakarta: ANDI.

Bungin, B. (2015). *Metodologi penelitian kuantitatif: Komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.

Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hikmat, H. (2004). *Strategi pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Humaniora.

Keban, Y. T. (2008). *Enam dimensi strategis administrasi publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Kuncoro, M. (2010). *Usaha kecil dan ekonomi informal di Indonesia: Masalah dan kebijakan*. Jakarta: Erlangga.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Ndraha, T. (2003). *Kybernologi: Ilmu pemerintahan baru*. Jakarta: Rineka Cipta.

Riduwan. (2013). *Skala pengukuran variabel-variabel penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Siagian, S. P. (2003). *Teori dan praktik kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, E. (2012). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Kencana.

Thoha, M. (2003). *Perilaku organisasi: Konsep dasar dan aplikasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.